

## PENGARUH FAKTOR DETERMINAN TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS

Amyati<sup>1\*</sup>, Denok Kurniasih<sup>2</sup>, Tobirin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

\*[amyati@mhs.unsoed.ac.id](mailto:amyati@mhs.unsoed.ac.id)

### Abstrak

Permasalahan dalam implementasi program Kampung keluarga berencana hingga saat ini masih banyak mengalami kendala, sehingga realisasi program KB bagi masyarakat masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi terhadap tingkat keberhasilan implementasi program Kampung KB. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, menerapkan metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi. Hasil penelitian menggambarkan keberhasilan implementasi program Kampung KB mengalami peningkatan, meliputi pencapaian program Tribina 67% dan tingkat kesadaran masyarakat dalam program Kampung KB 71,1% sehingga mampu mendorong pertumbuhan pencapaian keikutsertaan Program KB, peningkatan keharmonisan rumah tangga dan keikutsertaan masyarakat dalam penggunaan produk KB. komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB. Sumber daya memiliki pengaruh yang lemah terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB yang disebabkan perencanaan kegiatan dan anggaran, sarana dan prasarana kurang sesuai dengan kebutuhan alokasi di lapangan. Namun pelaksanaan program tetap didukung terpenuhinya kebutuhan SDM pelaksana teknis sebagai tenaga lini lapangan dengan sebagian besar IMP atau kader memiliki masa kerja lebih dari lima tahun sehingga sudah memiliki ketrampilan dan pengalaman dalam program Kampung KB. Sebagai kesimpulan peningkatan keberhasilan program Kampung KB ditentukan oleh faktor komunikasi yang jelas dan berkelanjutan, disposisi para implementator khususnya IPM sebagai tenaga lini lapangan, dan struktur birokrasi perangkat daerah dan BKKBN. Sumber daya masih menjadi faktor penghambat program disebabkan sistem perencanaan kegiatan dan anggaran yang bersifat topdown yang berdampak pada ketidak sesuaian rencana kegiatan dan alokasi anggaran dengan kebutuhan prioritas kelompok sasaran.

**Kata Kunci:** Disposisi, Implementasi, Komunikasi, Program Kampung KB, Struktur Birokrasi, Sumber Daya

### Abstract

The problems in the program implementation of the family planning village are still experiencing many obstacles, so that the realization of family planning programs for the community is still low. This study aims to analyze and test the factors of communication, resources, dispositions, bureaucratic structure on the success of implementing the program of family planning Village. The research was carried out in Banyumas Regency, applying quantitative research methods. Data collection was carried out through questionnaires, observation and documentation. Data analysis using descriptive analysis method and regression analysis. The results of the study illustrate that the successful implementation program of family planning Village has increased, including the achievement of the three coaching program (Tribina) of 67% and the level of public awareness in the family planning Village of 71.1% so that it is able to encourage growth in the achievement of family planning Program participation, increase in household harmony and community participation in the use of family planning product. communication, disposition and bureaucratic structure have a significant influence on the successful implementation of the family planning Village program. Resources have a weak influence on the successful implementation of the family planning Village program due to the fact that the planning of activities and budgets, facilities and infrastructure does not match the allocation needs in the field. However, the implementation of the program is still supported by the fulfillment of the human resources needs for technical implementers as field line workers with most IMPs or cadres having worked for more than

five years so they already have the skills and experience in the family planning Village program. So that it can be concluded that the increase in the success of program the family planning Village is determined by clear and sustainable communication factors, the disposition of implementers, especially IPM as field line staff, and the bureaucratic structure of regional organization and BKKBN. Resources are still an inhibiting factor for the family planning program due to the top-down activity planning and budgeting system which has an impact on the incompatibility of activity plans and budget allocations with the priority needs of the target group.

**Keywords:** Bureaucratic Structure, Implementation, Communication, Disposition, Family Planning Village, Resources

## PENDAHULUAN

Persoalan pengendalian jumlah penduduk tersebut tentu memiliki keterkaitan dengan tahapan implementasi kebijakan. Persoalan implementasi kebijakan tidak hanya sekedar keterkaitan rumusan kebijakan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan para pembuat kebijakan ke dalam *prosedur* rutin melalui saluran birokrasi. tetapi memiliki keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak berkerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya, sehingga pada akhirnya kebijakan hanya berupa harapan atau rencana yang bagus dan tersimpan dalam arsip jika tidak diimplementasikan.

Pemerintahan Presiden telah merancang sembilan agenda prioritas yang digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. salah satu agenda kebijakan nasional adalah untuk menghadapi masalah kependudukan yang bersifat dinamis dan aktual. Dinamika kependudukan menyebabkan situasi kependudukan sangat kompleks karena terkait dengan dimensi-dimensi lain yang sangat luas yaitu ekonomi, politik, sosial, lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan penyelarasan program kependudukan yang aktual dan berkesinambungan. Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara nasional merupakan terobosan baru yang bersifat kedaerahan dan bernuansa kearifan lokal pada tiap-tiap daerah. Gagasan tentang Kampung Keluarga Berencana merupakan salah satu Inovasi Strategis Memberdayakan Masyarakat dalam mendukung keberhasilan implementasi Program KB Nasional. Penyelarasan kebijakan menjadi sangat krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah karena keleluasaan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk merencanakan, melaksanakan dan menentukan prioritas pembangunan di daerah menghasilkan keberagaman pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawacita dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang terjangkau oleh pandangan pemerintah tingkat pusat. Sebagaimana disebutkan dalam Nawa Cita ke tiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawa Cita ke lima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. dan Nawa Cita ke delapan melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Kampung KB memberikan harapan, kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB maksud memberikan inovasi strategis untuk dapat

mengimplementasikan kegiatan prioritas program KKB PK secara utuh dan sebagai salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan program KKB PK yang melibatkan seluruh unsur aparatur dan masyarakat desa dan kecamatan, sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam program Kampung KB yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. pada prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Permasalahan utama yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi gagasan program Kampung KB tersebut belum diiringi dengan sistem rekrutmen dan stimulan bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang sesuai, sehingga kedua hal tersebut menjadi faktor determinasi yang dapat menyebabkan kendala dalam proses implementasi Kampung KB di lapangan. Salah satu bukti empiris yang dapat dilihat yaitu implementasi program Kampung KB di Kabupaten Banyumas yang merupakan salah satu daerah yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang pada awal pelaksanaan Kampung KB menjadi kabupaten dengan tingkat pembentukan Kampung KB tertinggi pada awal pelaksanaan program yaitu tahun 2016, tetapi pada tahun berikutnya pencapaian target program cenderung mengalami penurunan. pada studi pendahuluann tersebut mengukur keberhasilan program KKBPK dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek pengendalian kuantitas penduduk dan aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

Rendahnya capaian Program Kampung KB di Kabupaten Banyumas dilihat pada beberapa parameter: *pertama* kepesertaan baru tahun 2021 hanya mencapai 61% yaitu sebanyak 28.209 dari perkiraan permintaan masyarakat sebanyak 46.210. *Kedua* Kampung KB yang telah dibentuk banyak yang kurang aktif dan ada yang cenderung tidak berjalan, *Ketiga* keterserapan anggaran rendah, *Keempat* tingkat partisipasi masyarakat sasaran program rendah, *Kelima* target program tidak tercapai.

Gambaran permasalahan menurunnya pencapaian target program diantaranya *policy maker* hanya fokus pada pencapaian target dan realisasi kebijakan, kurang mengakomodasi aspirasi masyarakat dan faktor-faktor pendorong pelaksanaan program. Setiap kader Institusi masyarakat Pedesaan (IMP) dituntut banyak tugas dan memiliki ketrampilan tambahan seperti ketrampilan bidang teknologi informasi, tetapi sebagian besar kader IMP sudah memiliki peran ganda, sebagai IMP, Kader Posyandu, Kader PKK, Kedua terdapat kesenjangan Kebijakan sistem honor antara petugas penyuluh yang direkrut oleh Kementerian dan petugas penyuluh yang direkrut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas yang menyebabkan kesenjangan antara kader IMP, Ketiga sistem stimulan IMP sangat rendah dibandingkan dengan standar pemberian kompensasi pada program yang lain. Dalam perspektif ini, pelaksanaan peran ganda dan sistem stimulan bagi para pelaksana program dalam hal ini adalah Kader IMP dapat menjadi salah satu faktor penentu efektivitas implementasi program Kampung KB di Kabupaten Banyumas.

Bersandar pada uraian di atas, maka dapat diduga efektivitas capaian program Kampung KB sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan sturktur birokrasi yang saling berkaitan dalam melaksanakan program Kampung KB. Implementasi kebijakan sebagai wujud dari pelaksanaan pembangunan berbasis pemberdayaan berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi suatu kebijakan yang akan mensejahterakan masyarakat, sehingga perlu adanya kajian tentang faktor determinan terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB di Kabupaten Banyumas yang diarpakan mendorong masyarakat untuk berdaya dan mampu menjalankan program dengan baik.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### 1. Kebijakan Publik

Menurut Anggara (2014) Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan

organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana di dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Pendapat Anderson (Wahab, 2016:3), merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi. Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich (Leo, 2017: 7) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan publik di atas, dapat dipahami yang dimaksud kebijakan publik adalah unsur-unsur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi melalui suatu keputusan yang mengandung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga kebijakan tersebut akan mendapat dukungan ketika diimplementasikan. Suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Menurut Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Nugroho (2016:657) menyatakan, "implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya". Selanjutnya menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: *Communication, Resources, Disposition or Attitudes, and Bureaucratic Structure*. Model kebijakan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward ini berperspektif top-down. Menurut George C. Edward ada 4 (empat) variable yang sangat menentukan untuk keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan publik, diantaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, melalui empat faktor ini kemudian akan dapat diidentifikasi hambatan dalam mencapai keberhasilan dari suatu proses pelaksanaan kebijakan. (Leo, 2017:137)

#### 1) Komunikasi

Komunikasi menurut Edward III sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan merekakerjakan.

Menurut Edward III komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- a) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta

substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- c) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Apabila para implementor kebijakan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan dan kerjakan itu berarti pertanda bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik maka daripada itu setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang akan dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten.

## 2) Sumber Daya

Variabel selanjutnya yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sumber daya. Sumber daya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa "*probably the most essential resources in implementing policy is staff*". Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Edward III (1980) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. terakhir pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

Perintah-perintah suatu kebijakan mungkin sudah dikomunikasikan secara tepat, akurat dan konsisten, akan tetapi jika pelaksana dari implementasi kebijakan kekurangan sumber-sumber daya yang diperlukan maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber daya merupakan sesuatu variabel yang penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud disini meliputi staf yang memiliki kemampuan yang kompeten dan keterampilan dalam bidang-bidangnya dan dalam hal keuangan. mengingat dalam Program Kampung KB merupakan pekerja Sosial.

## 3) Disposisi

Selanjutnya faktor determinan ke tiga menurut Edward III yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan yaitu disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor yang sangat penting ke tiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sesuai dengan bidangnya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang

bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

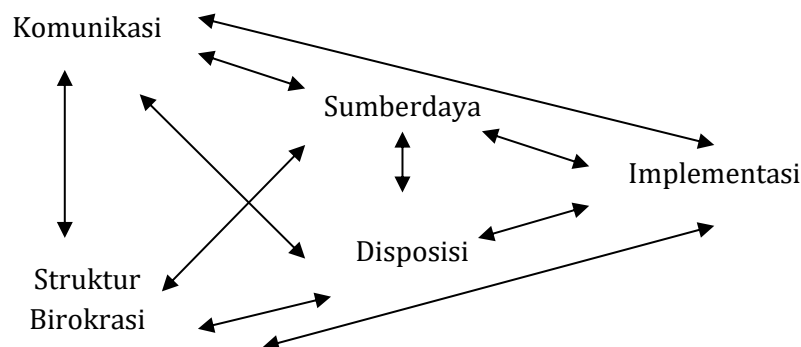
#### 4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu jenis organisasi atau lembaga yang sering bertindak sebagai pelaksana kebijakan. Meskipun sumber daya sudah tersedia, pelaksana kebijakan paham akan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya namun kurang efektif ketika struktur organisasi pelaksana kebijakan tidak efisien.

Hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- a) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- b) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- c) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- e) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- f) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Setelah melihat penjelasan diatas, peneliti akan memberikan suatu gambaran mengenai alur dari 4 faktor pendukung dari implementasi kebijakan menurut Edward III pada gambar di bawah ini



Gambar 1. Model Implementasi Edward III (1980)

## 2. Kebijakan Program Kampung KB

Pratiwi dan Basuki (2014) menjelaskan Keluarga Berencana atau disingkat KB merupakan program yang ada di hampir setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengontrol jumlah penduduk dengan mengurangi jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan usia 15–49 tahun, yang kemudian disebut dengan angka kelahiran total atau *total fertilityrate* (TFR). Keluarga yang mengikuti program KB diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka. Perkembangan program Keluarga Berencana di Indonesia mengalami suatu metamorphosis dimana ada periode BKKBN yang kemudian berkembang menjadi Kementerian Negara Kependudukan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dimulai pada tahun 1967, dengan tujuan mengatur masalah kependudukan (demografi), melalui falsafah Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).

Menurut Pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017:13) menyatakan bahwa Kampung KB adalah satuanwilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Kampung KB merupakan salah satu model pelaksanaan total program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta merupakan program strategis dalam upaya percepatan agenda program pembangunan khususnya pada daerah pinggiran. Keberhasilan Kampung KB dapat diukur dengan indikator input, indikator proses, dan indikator output sebagai berikut: (Pedoman Pengelolaan Kampung KB, 2017:13)

- 1) Indikator Input
  - a) Tingginya Partisipasi seluruh potensi Kampung untuk kemajuan Kampung KB
  - b) Beragamnya kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu baik program pemerintah maupun inovasi masyarakat
  - c) Besarnya sumber anggaran Kampung KB yang didapat baik dari iuran masyarakat, bantuan pemerintah maupun donatur yang tidak mengikat
  - d) Ketersediaan sarana dan prasarana
- 2) Indikator Proses
  - a) Berjalannya kegiatan dimasing- masing seksi
  - b) Peran serta petugas Pemerintah dalam sinkronisasi kegiatan
  - c) Peran serta institusi masyarakat dalam pengelolaan Kampung KB
  - d) Menjalankan 8 (delapan) fungsi keluarga dilaksanakan disetiap keluarga
  - e) Frekuensi dan kualitas kegiatan KIE/ Penyuluhan
  - f) Frekuensi pelayanan KB-KR
  - g) Frekuensi pelayanan dari sektor lainnya
  - h) Frekuensi pertemuan berkala kelompok-kelompok kegiatan (baik program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluargamaupun kegiatan sektor terkait di Kampung KB)
  - i) Frekuensi kegiatan gerakan masyarakat Kampung KB
- 3) Indikator Output
  - a) Keberhasilan Kampung KB dapat diukur dari pelaksanaan 8 fungsi di masing-masing keluarga yaitu meningkatnya pelaksanaan keagamaan (Keluarga semakin rajin beribadah)
  - b) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat baik ilmu pengetahuan maupun profesionalisme (semakin banyak orang yang memiliki keterampilan untuk meningkatkan usaha)
  - c) Tercapainya rata-rata dua anak setiap keluarga, keluarga sehat, anak tumbuh dan berkembang dengan baik
  - d) Meningkatnya income perkapita keluarga dan pemanfaatannya menunjang kepentingan keluarga
  - e) Terlindunginya masyarakat/keluarga dan hidup tentram dan nyaman
  - f) Semakin terjalinnya hubungan harmonis antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan
  - g) Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di keluarga maupun masyarakat sekampung
  - h) Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan

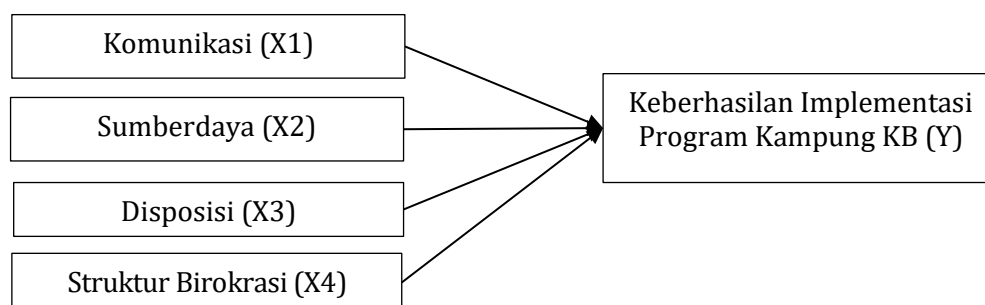
Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

### 3. Hipotesis Penelitian

Suatu program akan berjalan efektif jika ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten sehingga dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Komunikasi dapat menentukan keberhasilan Implementasi Program Kampung KB Di Kabupaten Banyumas. Untuk menentukan hipotesis penelitian ini mempertimbangkan keunikan model Edward III terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. sumber daya menjadi variabel determinan yang penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sehingga program atau kebijakan dapat dilaksanakan dengan sukses. Penyusunan hipotesis juga didasarkan pada hasil beberapa studi sebelumnya.

Nur Fitria Ramadhani dan Tukiman (2020) menjelaskan disposisi terkait sikap pelaksana yang selalu aktif dalam penyuluhan sosialisasi guna untuk meningkatkan ketanggapan respons masyarakat untuk ber-KB. Nur Fitria Ramadhani dan Tukiman (2020) faktor struktur birokrasi mendukung pencapaian program Kampung KB dibuktikan dengan adanya SOP dan struktur organisasi secara tertulis bagi Tim Pokja Kampung KB Kelurahan Sidotopo, Roby Hadi Putra dan Afriva Khaidir (2019) juga menyimpulkan pencapaian implementasi didukung oleh faktor komunikasi dan struktur birokrasi yang sederhana. Beberapa penelitian menjelaskan penghambat pencapaian program disebabkan faktor pengelolaan sumberdaya yang belum optimal dan sikap pelaksana yang cenderung belum melaksanakan kebijakan. Meskipun sumber daya sudah tersedia, pelaksana kebijakan paham akan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya namun kurang efektif ketika struktur organisasi pelaksana kebijakan tidak efisien. Hasil penelitian terbaru oleh Rachmawati, Rosdianti Razak, Anwar Parawangi (2022) menjelaskan 1) komunikasi yang dilakukan dengan baik sehingga masyarakat sudah bisa menerima dan mengerti informasi dari pihak pembuat kebijakan tersebut. 2) Sumber Daya yang dimiliki masih belum tercukupi untuk memberikan penyuluhan ataupun pendampingan program Kampung KB. 3) Disposisi atau Sikap pelaksana, dilakukan dengan melakukan pembagian tugas dengan baik sehingga mendukung program KB. 4) pelaksanaan program KB tidak terlepas dengan struktur yang telah diberikan tugas dalam menjalankan kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan baik karena sudah diatur sesuai penempatannya setiap bidang-bidang sehingga terkoordinasi untuk membuat kerja sama yang baik.

Berdasarkan pengembangan konsep dan teori yang telah diuraikan pada landasan teori, maka dapat dikembangkan hipotesis model geometri sebagai berikut:



Gambar 2. Hipotesis Model Geometri

Berdasarkan Hipotesis Model Geometri dan tujuan penelitian, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

- Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh Komunikasi terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Banyumas.
- Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh Sumber Daya terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Banyumas.
- Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh Disposisi terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Banyumas.



Hipotesis 4 : Terdapat pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Banyumas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, menerapkan metode penelitian kuantitatif. Penelitian didasarkan pada keberlanjutan program KB yang cenderung kurang aktif. Subyek penelitian ini adalah Lini Lapangan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Tingkat Kecamatan dan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Tingkat Desa. Total populasi yang tersedia berjumlah 327 orang dan yang ditetapkan sampel sebesar 180 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Data

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan penilaian responden terhadap variabel penelitian. hasil analisis deskriptif menjelaskan kondisi yang sesungguhnya terkait pencapaian kinerja dan faktor-faktor yang menentukan kinerja program yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Penyelenggaraan program Kampung KB di Kabupaten Banyumas yang diukur dengan 9 (sembilan) indikator capaian program telah tercapai dengan baik, dengan angka mode lebih besar dari angka *mean*. Pencapaian tertinggi pada Pencapaian Keikutsertaan Program KB yang ditunjukkan dengan angka *mean* sebesar 3,88 dan Pencapaian Peningkatan Keharmonisan Rumah Tangga yang ditunjukkan dengan angka *mean* sebesar 3,86. capaian selanjutnya adalah Pencapaian Program Tribina yang meliputi Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia (BKB, BKR, BKL) ditunjukkan dengan angka *mean* 3,74. Sedangkan capaian program Kampung KB yang masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan indikator capaian yang lain meliputi: Pencapaian Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-RM) ditunjukkan dengan angka *mean* 3,22 dan angka modus 3, capaian Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) memperoleh angka *mean* sebesar 3,27 dan angka modus 3.

Sistem komunikasi yang dilaksanakan pada penyelenggaraan program Kampung KB di Kabupaten Banyumas yang diukur dengan 5 (lima) indikator komunikasi telah dilaksanakan dengan cukup baik, dengan angka mode lebih besar dari angka *mean*. Penilaian tertinggi pada pelaksanaan sosialisasi yang ditunjukkan dengan angka *mean* 3,79 dan angka mode 4. Kejelasan Informasi dalam program memiliki angka *mean* 3,70, kejelasan tujuan dan sasaran Program memiliki angka *mean* sebesar 3,66, keberlanjutan sosialisasi dan pendistribusian informasi memiliki angka *mean* 3,56. sedangkan faktor komunikasi terendah adalah penggunaan media sosialisasi yang ditunjukkan angka *mean* 3,48 dan angka modus lebih rendah daripada angka *mean*.

Dukungan sumber daya pada penyelenggaraan program Kampung KB di Kabupaten Banyumas telah terpenuhi dengan cukup baik, dengan angka modus pada beberapa faktor lebih besar dari angka *mean*. Penilaian tertinggi pada dukungan sumber daya berupa terpenuhinya jumlah SDM pelaksana teknis dalam hal ini adalah tenaga lini lapangan baik IMP maupun kader KB yang ditunjukkan dengan angka *mean* 3,86 dan angka mode 4. Ketrampilan dan Kompetensi SDM memiliki angka *mean* sebesar 3,68 karena sebagian besar tenaga lini lapangan memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dan mendapatkan pembekalan tentang program Kampung KB. Faktor terendah meliputi dukungan anggaran dan dukungan sarana prasarana. Angka *mean* pada dukungan anggaran sebesar 3,26 sedangkan dukungan Sarana Prasarana program Kampung KB meliputi angka *mean* 3,06 – 3,13. dan angka modus lebih kecil dari angka *mean*.

Sikap para implementator pada penyelenggaraan program Kampung KB di Kabupaten Banyumas telah menunjukkan sikap atau disposisi cukup baik, dengan angka modus pada semua faktor lebih besar dari angka *mean*. Penilaian tertinggi pada dukungan disposisi para implementator berupa Kerjasama dalam pelaksana Program, Kesadaran dan keikhlasan SDM. Motivasi/semangat kerja SDM memiliki angka *mean* sebesar 3,88. Sebagian besar tenaga lini lapangan memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dan mendapatkan pembekalan tentang program Kampung KB sehingga dalam implementasi program mampu menunjukkan perilaku yang mendukung terhadap program. Faktor terendah meliputi Sikap Demokratik yang ditunjukkan angka *mean* 3,61 dan Komitmen SDM pelaksana yang memiliki angka *mean* 3,61 dan sikap demokratik dengan besarnya angka mean 3,64.

Komitmen dan para implementator pada penyelenggaraan program Kampung KB di Kabupaten Banyumas telah menunjukkan penerapan struktur birokrasi yang cukup baik, dengan angka modus pada semua faktor lebih besar dari angka *mean*. Penilaian tertinggi pada pembagian tugas dan tanggung jawab dengan angka mean sebesar 3,62; Penerapan Standar Prosedur Operasional dengan angka mean sebesar 3,59 dan Rekrutmen tenaga lini lapangan dengan angka 3,58. Faktor terendah meliputi layanan aduan masyarakat yang ditunjukkan angka *mean* 3,42 dan Pemberian kompensasi/ stimulan bagi tenaga lini lapangan angka *mean* sebesar 3,39.

Berdasarkan hasil penilaian faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian implementasi yang meliputi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, faktor yang saat ini paling rendah adalah faktor struktur birokrasi, faktor dukungan sumber daya dan disposisi juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan faktor komunikasi.

## 2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan teknik uji regresi antar variabel penelitian digunakan untuk menguji adanya hubungan dan pengaruh faktor penentu keberhasilan program dengan pencapaian program Kampung KB di Kabupaten Banyumas yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Analisis menggunakan regresi berganda dengan menghitung angka determinasi atau koefisien regresi dan angka signifikansi regresi yang diperoleh, sehingga dapat ditentukan apakah Keberhasilan Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Banyumas ditentukan secara signifikan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Hasil olah data menunjukkan bahwa perbandingan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  adalah  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $43,317 > 2,27$ ) dengan angka sig 0,000 ( $p < 0,05$ ), maka pada tingkat kekeliruan 5%  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa variabel Komunikasi (X1), Sumber Daya (X2), Disposisi (X3), dan struktur birokrasi (X4) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja implementasi Program Kampung KB (Y)

Selanjutnya, mengetahui besarnya pengaruh Komunikasi (X1), Sumber Daya (X2), Disposisi (X3), dan struktur birokrasi (X4) terhadap Kinerja implementasi Program Kampung KB (Y), dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi. Koefisien Regresi ( $R$ ) pada intinya mengukur seberapa besar kontribusi variabel Komunikasi (X1), Sumber Daya (X2), Disposisi (X3), dan struktur birokrasi (X4) secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja implementasi Program Kampung KB (Y). Nilai koefisien regresi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai  $R$  yang kecil berarti kemampuan variabel Komunikasi (X1), Sumber Daya (X2), Disposisi (X3), dan struktur birokrasi (X4) dalam menjelaskan variabel Kinerja implementasi Program Kampung KB (Y) adalah sangat kecil atau terbatas. Nilai yang mendekati satu, berarti kemampuan variabel dalam menjelaskan variabel Program Kampung KB (Y) sangat besar atau berpengaruh kuat.

Dalam penelitian ini koefisien regresi menggunakan nilai  $R^2$ . Hasil uji regresi berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh antara Komunikasi (X1), Sumber Daya (X2), Disposisi (X3), dan struktur birokrasi (X4) terhadap Kinerja implementasi Program Kampung KB (Y) dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut:

Koefisien regresi diperoleh angka  $R^2$  sebesar 0,498 (49,8%) merupakan hasil pengkuadratan dari angka  $R$  yaitu  $0,705^2$  yang menunjukkan kekuatan pengaruh yang

diberikan variabel Komunikasi (X1), Sumber Daya (X2), Disposisi (X3), dan struktur birokrasi (X4) secara simultan terhadap Kinerja implementasi Program Kampung KB (Y). Angka  $R^2$  sebesar 0,498 menunjukkan bahwa 49,8% variabel Kinerja implementasi Program Kampung KB (Y) dipengaruhi atau dapat dijelaskan oleh variabel Komunikasi (X1), Sumber Daya (X2), Disposisi (X3), dan struktur birokrasi (X4) Sedangkan sisanya ( $100\% - 49,8\% = 50,2\%$ ) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini dan sudah termasuk dalam kesalahan pengganggu (*disturbance error*).

Hasil pengujian memperoleh angka konstan sebesar  $a = 10,569$  artinya apabila tidak terdapat faktor penentu keberhasilan implementasi Program KB di Kabupaten Banyumas maka Kinerja atau tingkat keberhasilan implementasi program yang telah dipenuhi adalah sebesar 10,569. Kebiduan masing-masing faktor tersebut akan menyebabkan peningkatan atau penurunan tingkat capaian keberhasilan program Kampung KB dilihat dari besarnya nilai koefisien beta yang menjelaskan arah hubungan positif atau negatif. Kriteria penerimaan atau penolakan dalam pengujian hipotesis digunakan taraf signifikansi 0,05.

a. Pengujian hipotesis 1

Pengujian hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan menggunakan teknik analisis statistik yaitu analisis regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau perubahan capaian keberhasilan implementasi program Kampung KB yang ditentukan oleh faktor komunikasi. Berdasarkan pada hasil olah dapat diketahui nilai koefisien betha  $b (X_1)$  sebesar 0,534 artinya menyatakan bahwa terdapat hubungan positif, sehingga setiap terjadi peningkatan nilai pada faktor komunikasi ( $X_1$ ) sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan pencapaian program Kampung KB (Y) sebesar 0,534 satuan. Berlaku sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai komunikasi ( $X_1$ ) sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan penurunan kinerja implementasi program kampung KB (Y) di Kabupaten Banyumas sebesar 0,534 satuan.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah koefisien korelasi faktor komunikasi ( $X_1$ ) terhadap peningkatan pencapaian program Kampung KB (Y) signifikan atau tidak, maka akan diuji dengan menggunakan tes koefisien korelasi dengan menggunakan t test. Tes koefisien korelasi dengan taraf kepercayaan 5% atau d.f = 5 % atau 0,05. Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung faktor komunikasi ( $X_1$ ) sebesar 4,516. Sedangkan t tabel pada tingkat signifikansi 5%, derajat kebebasan yaitu jumlah data-4 atau d.f = 180-4 (174) uji dilakukan dua sisi, maka t tabel diperoleh sebesar 1.653. Sehingga diketahui  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  yaitu  $4,516 > 1,653$  yang berarti pengaruh antara faktor komunikasi ( $X_1$ ) terhadap peningkatan pencapaian program Kampung KB (Y) adalah signifikan.

Gambaran pengaruh faktor komunikasi terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB di Kabupaten Banyumas, bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas setelah dicanangkannya Kampung KB, secara terus menerus mensosialisasikan pentingnya program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terkait program Kampung KB melalui 8 (delapan) Fungsi Keluarga yang difokuskan disemua wilayah Kampung KB dengan pengembangan sistem yang mencakup transmisi informasi baik dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi dan komunikasi (KIE) Program KKBPK di Kampung KB secara berkelanjutan dan adanya kejelasan serta kemudahan akses informasi yang bisa dipublikasikan melalui laman internet/web Kampung KB, sehingga diharapkan informasi tersebut tersampaikan secara luas dan dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Banyumas. Hal ini membuktikan adanya peningkatan perkembangan Klasifikasi Kampung KB di Kabupaten Banyumas.

Pengujian hipotesis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh sumber daya terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan menggunakan teknik analisis statistik yaitu analisis regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau perubahan capaian keberhasilan implementasi

program Kampung KB yang ditentukan oleh faktor komunikasi. Kriteria penerimaan atau penolakan dalam pengujian hipotesis digunakan taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan pada hasil olah data, dapat diketahui nilai koefisien betha  $b$  ( $X_2$ ) sebesar 0,013 artinya menyatakan bahwa terdapat hubungan positif, sehingga setiap terjadi peningkatan nilai pada faktor sumber daya ( $X_2$ ) sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan pencapaian program Kampung KB ( $Y$ ) sebesar 0,013 satuan. Berlaku sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai sumber daya ( $X_2$ ) sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan penurunan kinerja implementasi program kampung KB ( $Y$ ) di Kabupaten Banyumas sebesar 0,013 satuan.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah koefisien korelasi faktor sumber daya ( $X_2$ ) terhadap peningkatan pencapaian program Kampung KB ( $Y$ ) signifikan atau tidak, maka akan diuji dengan menggunakan tes koefisien korelasi dengan menggunakan  $t$  test. Tes koefisien korelasi dengan taraf kepercayaan 5% atau  $d.f = 5$  % atau 0,05. Hasil perhitungan diperoleh nilai  $t$  hitung faktor sumber daya ( $X_2$ ) sebesar 0,116. Sedangkan  $t$  tabel pada tingkat signifikansi 5%, derajat kebebasan yaitu jumlah data-4 atau  $d.f = 180 - 4$  (174) uji dilakukan dua sisi, maka  $t$  tabel diperoleh sebesar 1.653. Sehingga diketahui  $t$  tabel  $<$   $t$  hitung yaitu  $1.653 >$  0,116 yang berarti pengaruh antara faktor sumber daya ( $X_2$ ) terhadap peningkatan pencapaian program Kampung KB ( $Y$ ) adalah tidak signifikan.

Gambaran rendahnya pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya informasi dan kewenangan diantaranya adalah banyaknya SDM pelaksana Kampung KB merangkap jabatan dalam program lain sehingga dapat berdampak pada masing-masing pelaksana kurang mencurahkan perhatian terhadap pelaksanaan program Kampung KB. selanjutnya Keterserapan anggaran BOKB yang relatif rendah, adanya ketidak sesuaian antara ketetapan anggaran yang ditentukan oleh BKKBN dengan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Dalam hal ini proses perencanaan kegiatan dan penganggaran bokb kurang melibatkan unsur IPM dan tenaga Lini lapangan yang ada di wilayah Kampung KB.

- b. Pengujian hipotesis 3 pengaruh disposisi terhadap terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB di Kabupaten Banyumas

Pengujian hipotesis ketiga yang menyatakan terdapat pengaruh disposisi terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan menggunakan teknik analisis statistik yaitu analisis regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau perubahan capaian keberhasilan implementasi program Kampung KB yang ditentukan oleh faktor komunikasi. Kriteria penerimaan atau penolakan dalam pengujian hipotesis digunakan taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan pada hasil olah data, dapat diketahui nilai koefisien betha  $b$  ( $X_3$ ) sebesar 0,256 artinya menyatakan bahwa terdapat hubungan positif, sehingga setiap terjadi peningkatan nilai pada faktor disposisi ( $X_3$ ) sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan pencapaian program Kampung KB ( $Y$ ) sebesar 0,256 satuan. Berlaku sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai disposisi ( $X_3$ ) sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan penurunan kinerja implementasi program kampung KB ( $Y$ ) di Kabupaten Banyumas sebesar 0,256 satuan.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah koefisien korelasi faktor disposisi ( $X_3$ ) terhadap peningkatan pencapaian program Kampung KB ( $Y$ ) signifikan atau tidak, maka akan diuji dengan menggunakan tes koefisien korelasi dengan menggunakan  $t$  test. Tes koefisien korelasi dengan taraf kepercayaan 5% atau  $d.f = 5$  % atau 0,05. Hasil perhitungan diperoleh nilai  $t$  hitung faktor disposisi ( $X_3$ ) sebesar 2,245. Sedangkan  $t$  tabel pada tingkat signifikansi 5%, derajat kebebasan yaitu jumlah data-4 atau  $d.f = 180 - 4$  (174) uji dilakukan dua sisi, maka  $t$  tabel diperoleh sebesar 1.653. Sehingga diketahui  $t$  tabel  $<$   $t$  hitung yaitu  $1.653 <$  2,245 yang berarti pengaruh antara faktor disposisi ( $X_3$ ) terhadap peningkatan pencapaian program Kampung KB ( $Y$ ) adalah signifikan. Adanya pengaruh signifikan yang ditimbulkan oleh faktor disposisi dalam penyelenggaraan program Kampung KB di Kabupaten Banyumas digambarkan dengan adanya penerapan prosedur kerja dan pelaksanaan kewenangan oleh kader dan IMP tingkat Desa, IMP kecamatan dan IMP kabupaten yang mengedepankan komitmen motivasi dan semangat

dalam pelaksanaan kegiatan kejujuran dan sikap demokratik yang ditunjukkan oleh kader dan IMP sebagai tenaga lini lapangan.

- c. Pengujian hipotesis 4 pengaruh struktur birokrasi terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB di Kabupaten Banyumas

Pengujian hipotesis keempat yang menyatakan terdapat pengaruh struktur birokrasi terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan menggunakan teknik analisis statistik yaitu analisis regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau perubahan capaian keberhasilan implementasi program Kampung KB yang ditentukan oleh faktor komunikasi. Kriteria penerimaan atau penolakan dalam pengujian hipotesis digunakan taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan pada hasil olah data, dapat diketahui nilai koefisien betha  $b$  ( $X_4$ ) sebesar 0,367 artinya menyatakan bahwa terdapat hubungan positif, sehingga setiap terjadi peningkatan nilai pada faktor struktur birokrasi ( $X_4$ ) sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan pencapaian program Kampung KB ( $Y$ ) sebesar 0,367 satuan. Berlaku sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai struktur birokrasi ( $X_4$ ) sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan penurunan kinerja implementasi program kampung KB ( $Y$ ) di Kabupaten Banyumas sebesar 0,367 satuan.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah koefisien korelasi faktor struktur birokrasi ( $X_4$ ) terhadap peningkatan pencapaian program Kampung KB ( $Y$ ) signifikan atau tidak, maka akan diuji dengan menggunakan tes koefisien korelasi dengan menggunakan  $t$  test. Tes koefisien korelasi dengan taraf kepercayaan 5% atau  $d.f = 5$  % atau 0,05. Hasil perhitungan diperoleh nilai  $t$  hitung faktor struktur birokrasi ( $X_4$ ) sebesar 2,531. Sedangkan  $t$  tabel pada tingkat signifikansi 5%, derajat kebebasan yaitu jumlah data-4 atau  $d.f = 180-4$  (174) uji dilakukan dua sisi, maka  $t$  tabel diperoleh sebesar 1.653. Sehingga diketahui  $t$  tabel <  $t$  hitung yaitu  $1.653 < 2,531$  yang berarti pengaruh antara faktor disposisi ( $X_3$ ) terhadap peningkatan pencapaian program Kampung KB ( $Y$ ) adalah signifikan.

Bukti adanya pengaruh yang signifikan dari faktor struktur birokrasi terhadap pencapaian program Kampung KB adalah penerapan prosedur kerja dan pelaksanaan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan Bupati dan pedoman pelaksanaan program Kampung KB yang diterbitkan oleh BKKBN yang diperbarui setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga memperbaiki sistem rekrut tenaga lini lapangan dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan, keahlian dan pengalaman. pada sisi yang lain Pemerintah Kabupaten Banyumas juga memperbaiki sistem stimulan kader IMP dengan meningkatkan anggaran dan peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan.

### 3. Pembahasan

Revitalisasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dilakukan agar program KB dapat dirasakan manfaatnya oleh keluarga dan masyarakat. melalui program Kampung KB yang merupakan salah satu program prioritas dari BKKBN yang manfaatnya dapat secara langsung diterima oleh masyarakat dalam upaya pencapaian target/sasaran pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bersencana. Kampung KB menjadi inovasi strategis untuk mengejawantahkan program prioritas KKBPK secara utuh di lini lapangan, juga merupakan model miniatur pelaksanaan total program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN serta bersinergi dengan lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah dan dilaksanakan di tingkatan pemerintah terendah.

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memberikan kontribusi dalam ikut menentukan pencapaian Program Kampung KB di Kabupaten Banyumas secara signifikan. Besarnya kontribusi yang diberikan sebesar 49,8%. Artinya keempat faktor tersebut komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan pencapaian tujuan Program Kampung KB di Kabupaten Banyumas. Temuan penelitian ini

masih relevan dengan teori Edward III yang menjelaskan keberhasilan implementasi ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selanjutnya berdasarkan besarnya nilai koefisien regresi yang diperoleh pada masing-masing faktor maka dapat diketahui faktor apa yang memberikan pengaruh paling besar atau paling menentukan keberhasilan Program Kampung KB. Seperti diketahui hasil perhitungan regresi diperoleh nilai koefisien betha pada faktor komunikasi sebesar 0,534 dengan nilai signifikansi 0,000 yang memiliki arti memberikan pengaruh positif secara signifikan. Nilai koefisien betha pada faktor sumber daya sebesar 0,013 dengan nilai signifikansi 0,908 yang memiliki arti memberikan pengaruh positif tetapi sangat lemah atau tidak signifikan. Nilai koefisien betha pada faktor disposisi sebesar 0,256 dengan nilai signifikansi 0,026 yang memiliki arti memberikan pengaruh positif secara signifikan. Nilai koefisien betha pada faktor struktur birokrasi sebesar 0,367 dengan nilai signifikansi 0,012 yang memiliki arti memberikan pengaruh positif secara signifikan.

Pengaruh masing-masing faktor terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB di Kabupaten Banyumas dapat menjadi bukti empiris yang menjelaskan keberadaan kondisi saat ini dapat dibuktikan oleh hasil penelitian. Artinya penurunan capaian implementasi program Kampung KB di Kabupaten Banyumas dapat disebabkan oleh faktor komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi yang cenderung kurang mendukung atau masih kurang dioptimalkan. Sedangkan melihat kontribusi pengaruh yang disebabkan oleh faktor sumber daya yang menyatakan tidak signifikan memang pelaksanaan program Kampung KB di Kabupaten Banyumas mendapatkan dukungan sumber daya yang sesuai kebutuhan. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas PPKBP3A Kabupaten Banyumas, baik berupa dukungan anggaran, maupun pemenuhan kebutuhan tenaga lini lapangan dengan melibatkan kader dan IMP. Namun adanya sistem perencanaan kegiatan dan penganggaran yang bersifat *top down* maka terdapat beberapa perencanaan dan dukungan kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sebagai contoh adalah jenis kegiatan dan alokasi anggaran yang sudah tersedia tidak dapat direalisasikan karena terdapat ketidaksesuaian program dan kebutuhan. Misalnya tersedia alokasi alat kontrasepsi pria, IUD tetapi kebutuhan produk KB pada tingkat masyarakat adalah suntik atau pil.

Faktor disposisi dalam penyelenggaraan program Kampung KB di Kabupaten Banyumas digambarkan dengan adanya penerapan prosedur kerja dan pelaksanaan kewenangan oleh kader dan IMP tingkat Desa, IMP kecamatan dan IMP kabupaten yang mengedepankan komitmen motivasi dan semangat dalam pelaksanaan kegiatan kejujuran dan sikap demokratik yang ditunjukkan oleh kader dan IMP sebagai tenaga lini lapangan.

Bukti adanya dampak yang ditimbulkan dari peningkatan struktur birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap pencapaian program Kampung KB adalah penerapan prosedur kerja dan pelaksanaan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan Bupati dan pedoman pelaksanaan program Kampung KB yang diterbitkan oleh BKKBN yang diperbarui setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga memperbaiki sistem rekrut tenaga lini lapangan dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan, keahlian dan pengalaman. Pada sisi yang lain Pemerintah Kabupaten Banyumas juga memperbaiki sistem stimulan kader IMP dengan meningkatkan anggaran dan peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan.

Capaian implementasi program Kampung KB di atas dapat dijelaskan, gambaran tentang penyelenggaraan program Kampung KB di Kabupaten Banyumas yang diukur dengan 9 (sembilan) indikator capaian program telah tercapai dengan baik. Pencapaian tertinggi pada Pencapaian Keikutsertaan Program KB dan Pencapaian Peningkatan Keharmonisan Rumah Tangga, capaian selanjutnya adalah Pencapaian Program Tribina yang meliputi Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia (BKB, BKR, BKL). Sedangkan capaian program Kampung KB yang masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan indikator capaian yang lain meliputi: Pencapaian Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-RM) dan capaian Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Pelaksanaan Program KB di Kabupaten Banyumas tentu tidak dapat dihindarkan dengan karakteristik tenaga lini lapangan sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan kepada

masyarakat. Adapun karakteristik responden yang berpartisipasi memiliki keterkaitan dalam mendukung pencapaian program meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan masa kerja. Tenaga lini lapangan saat ini memiliki tingkat pendidikan IMP mayoritas pada jenjang pendidikan SMA, namun sebagian telah menempuh pendidikan pada perguruan tinggi. Pada IMP Desa masih banyak yang berpendidikan SMP responden mayoritas usia 36-50 tahun dengan masa kerja lebih dari 5 tahun. Mayoritas IMP memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun dan hingga usia lebih dari 50 tahun, bahkan beberapa IMP sudah berusia di atas 60 tahun. sedangkan dilihat dari usia, IMP Desa sudah mulai dilakukan pengkaderan dengan anggota yang lebih muda.

Faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian implementasi yang meliputi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, faktor yang saat ini paling rendah adalah faktor struktur birokrasi, faktor dukungan sumber daya dan disposisi juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan faktor komunikasi. Gambaran tentang sistem komunikasi yang dilaksanakan pada penyelenggaraan program Kampung KB di Kabupaten Banyumas yang diukur dengan 5 (lima) indikator komunikasi telah dilaksanakan dengan cukup baik. Penilaian tertinggi pada pelaksanaan sosialisasi. Kejelasan Informasi dalam program, kejelasan tujuan dan sasaran Program, keberlanjutan sosialisasi dan pendistribusian informasi. sedangkan faktor komunikasi terendah adalah penggunaan media sosialisasi. hasil analisis dukungan faktor komunikasi dalam menentukan Keberhasilan Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Banyumas dapat di jelaskan yaitu, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui DPPKBP3A sejak dimulainya program kampung KB hingga saat ini masih terus melakukan sosialisasi dan mengembangkan program kampung KB pada desa-desa yang belum terbentuk.

Faktor sumber daya meliputi 6 (enam) aspek yaitu ketersediaan jumlah sdm pelaksana teknis, ketrampilan dan kompetensi sdm, dukungan anggaran pemerintah, dukungan anggaran swadaya masyarakat, dukungan sarana program dan dukungan prasarana program. dapat dijelaskan gambaran tentang dukungan sumber daya pada penyelenggaraan program Kampung KB di Kabupaten Banyumas telah terpenuhi dengan cukup baik. Penilaian tertinggi pada dukungan sumber daya berupa terpenuhinya jumlah SDM pelaksana teknis dalam hal ini adalah tenaga lini lapangan baik IMP maupun kader KB. Ketrampilan dan Kompetensi SDM karena sebagian besar tenaga lini lapangan memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dan mendapatkan pembekalan tentang program Kampung KB. Faktor terendah meliputi dukungan anggaran dan dukungan sarana prasarana. sedangkan dukungan Sarana Prasarana program Kampung KB.

Rendahnya pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya informasi dan kewenangan diantaranya adalah banyaknya SDM pelaksana Kampung KB merangkap jabatan dalam program lain sehingga dapat berdampak pada masing-masing pelaksana kurang mencurahkan perhatian terhadap pelaksanaan program Kampung KB. selanjutnya Keterserapan anggaran BOKB yang relatif rendah, adanya ketidak sesuaian antara ketetapan anggaran yang ditentukan oleh BKKBN dengan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Dalam hal ini proses perencanaan kegiatan dan penganggaran bokb kurang melibatkan unsur IPM dan tenaga Lini lapangan yang ada di wilayah Kampung KB.

Faktor disposisi meliputi 5 (lima) aspek yaitu rekrutmen tenaga lini lapangan, pembagian tugas dan tanggung jawab, penerapan standar prosedur operasional, layanan aduan masyarakat program, dan pemberian kompensasi/ stimulan. Dapat dijelaskan gambaran tentang sikap para implementator pada penyelenggaraan program Kampung KB di Kabupaten Banyumas telah menunjukkan sikap atau disposisi cukup baik. Penilaian tertinggi pada dukungan disposisi para implementator berupa Kerjasama dalam pelaksana Program, Kesadaran dan keikhlasan SDM. Motivasi/semangat kerja SDM. Sebagian besar tenaga lini lapangan memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dan mendapatkan pembekalan tentang program Kampung KB sehingga dalam implementasi program mampu menunjukkan perilaku yang mendukung terhadap program. Faktor terendah meliputi Sikap Demokratik dan Komitmen SDM pelaksana.

Faktor struktur birokrasi dalam implementasi program Kampung KB dapat dijelaskan gambaran tentang komitmen dan para implementator pada penyelenggaraan program Kampung KB di Kabupaten Banyumas telah menunjukkan penerapan struktur birokrasi yang cukup baik. Penilaian tertinggi pada pembagian tugas dan tanggung jawab, Penerapan Standar Prosedur Operasional dan Rekrutmen tenaga lini lapangan. Faktor terendah meliputi layanan aduan masyarakat dan Pemberian kompensasi/ stimulan bagi tenaga lini lapangan. secara berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Banyumas masih komitmen dalam melaksanakan program Kampung KB, bahkan melalui program Kampung KB merupakan upaya pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anak untuk menekan angka stunting.

Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Banyumas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kampung KB merupakan salah satu upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, di wilayah minimal setingkat Dusun atau Rukun Warga.

Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, Keluarga Berencana, dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Tujuan utama pengembangan Kampung KB di Wilayah Kabupaten Banyumas, adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Kampung KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB, ditetapkan melalui tahapan rapat penetapan wilayah Kampung KB yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten Banyumas dan penetapan wilayah Kampung KB yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Kelompok Kampung KB Desa/Kelurahan.

## KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Keberhasilan Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan, meliputi pencapaian program Tribina 67% dan Tingkat kesadaran masyarakat dalam Program Kampung KB 71,1% sehingga mampu mendorong pertumbuhan pencapaian keikutsertaan Program KB, peningkatan keharmonisan rumah tangga dan keikutsertaan masyarakat dalam penggunaan produk KB.
  2. Komunikasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Banyumas, terutama didukung pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan sehingga diperoleh kejelasan informasi dalam program serta kejelasan tujuan dan sasaran program.
  3. Sumber daya memiliki pengaruh yang lemah terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Banyumas. Dikarenakan seringkali terjadi perencanaan kegiatan dan anggaran, sarana dan prasarana kurang sesuai dengan kebutuhan alokasi di lapangan. Namun pelaksanaan program tetap didukung terpenuhinya kebutuhan SDM pelaksana teknis sebagai tenaga lini lapangan dengan sebagian besar IMP atau kader memiliki masa kerja lebih dari lima tahun sehingga sudah memiliki ketrampilan dan pengalaman dalam program Kampung KB.



4. Disposisi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Banyumas. terutama didukung oleh kemampuan kerjasama dalam pelaksana program Kampung KB, kesadaran dan keikhlasan SDM lini lapangan sehingga memberikan otivasi/semangat kerja SDM untuk melaksanakan program secara sukarela sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
5. Struktur birokrasi memiliki pengaruh secara terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Banyumas, Adanya pengaruh didukung oleh pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai kemampuan IMP serta penerapan standar prosedur operasional mengacu pada pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan teknis Program Kampung KB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfa Beata, Bandung.
- D.S. van Meter & C.E., van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process A Conceptual Framework", *Administration & Society*, 6(4), 445-488. hlm. 447
- Edward, C George. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quartely Inc, Washington DC.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 5*. BPFE Undip, Semarang.
- Nur Fitria Ramadhani Tukiman T. 2020. Implementasi Program Kampung KB Di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *PAJ* Vol 2 No.4. DOI: <https://doi.org/10.33005/paj.v2i4.65>.
- Pratiwi, Niniek Lely dan Basuki, Heri. 2014. Health Seeking Behavior dan Aksesibilitas pelayanan Keluarga Berencana di Indonesia. *Jurnal: Naskah layak terbit* 29 Januari 2014.
- Riant Nugroho, 2016. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang* . Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hal. 60.
- Sahya Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia, Bandung. hal. 14
- Sugiyono. 2019. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Alih Bahasa: Samodra Wibawa*, dkk. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. hal. 25.
- Yang, N., Chen, C., Choi, J., and Zou, Y. 2020. Sources Of Work-Family Conflict: A Sino-U.S. Comparison Of The Effects Of Work And Family Demands. *Academy of Management Journal*, 43(1):113-123.